

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2021**

**FIDYAWATI DJAPRI  
A031191029**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2021**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FIDYAWATI DJAPRI**  
**A031191029**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2021

disusun dan diajukan oleh

**FIDYAWATI DJAPRI**  
**A031191029**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA  
NIP 19660822 199403 1 009

Pembimbing II



Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., AK., CA., CRA., CRP  
NIP 19651127 199103 2 001



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
  
Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2021

disusun dan diajukan oleh

**FIDYAWATI DJAPRI**  
**A031191029**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 11 Mei 2023 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

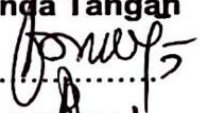
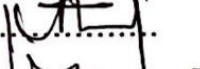


### No. Nama Penguji

1. Dr. Darwis Siad, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA
2. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA.,CRA.,CRP
3. Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E, M.Si., Ak.,CA.CRA., CRP
4. Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.

### Jabatan

- Ketua  
Sekertaris  
Anggota  
Anggota

### Tanda Tangan

1.   
2.   
3.   
4. 

Ketua Departemen Akuntansi  
Pakaritas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E.,M.Si.  
NIP-19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fidyawati Djapri  
NIM : A031191029  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

### **ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2021**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 30 Januari 2023

Yang membuat pernyataan

  
Fidyawati Djapri

## PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakkatuh

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2018-2021 ". Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tentunya memiliki banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, tetapi akhirnya dapat dilewati berkat banyaknya bantuan dan dukungan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya karena masih memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan ilmu serta kemudahan dalam menjalani proses perkuliahan dari awal hingga mendapatkan gelar sarjana.

2. Orang tua tercinta penulis, Ibu Rugayah S.E, Bapak Djapri Pato S.sos yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik dari segi materiil dan non materiil serta terimakasih telah selalu senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya.
3. Kakak dan adik yang sangat penulis sayangi Janna dan Nurdin yang sudah memberikan semangat dan motivasi serta senantiasa mendukung dan mendoakan untuk kelancaran skripsi ini.
4. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Darwis Siad, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA.,CRA.,CRP selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E, M.Si., Ak.,CA.CRA., selaku dosen Penasehat Akademik serta Dosen Penguji dan Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. selaku Dosen penguji yang telah memberikan saran-saran demi penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama

9. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pak Ical dan Pak Richard atas seluruh bantuannya dalam menyelesaikan kelengkapan administrasi serta masukannya dalam berkomunikasi dengan dosen dilingkup kampus.
10. Seluruh keluarga dan tetangga yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat seperjuangan dikampus yaitu Dea Gheby Yolanda, Khaerani Makbul, Yunike Arista Kusumawardani, Andi Qien Qien Qabila Fuadi, Alifah Annisa, Nur saidah Kamilah , Ainun Khaeriyah Nur Iva, Terima kasih atas bantuan, semangat, doa dan motivasi selama berkuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat SMP yaitu Putri Mentari, Nurhalisah Hasanuddin, dan Tenri Muhraina, Terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasi serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan masukan yang membuat penulis lebih semangat lagi.
13. Seluruh pihak di Kantor Wali Kota Makassar terkhusus di bagian BPKAD yang telah membantu dalam pengumpulan data di penelitian ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu yang selalu membantu penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran



yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Fidyawati Djapri

## ABSTRAK

### **Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2018-2021**

#### ***Analysis of the Performance of the Makassar City Regional Budget (APBD) for 2018-2021***

Fidyawati Djapri  
Darwis  
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif untuk perhitungan analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini varians pendapatan daerah menunjukkan kategori kurang baik, analisis rata-rata Derajat Desentralisasi dikategorikan cukup, rata-rata Kemandirian Keuangan daerah dikategorikan sangat baik. rata-rata Ketergantungan keuangan termasuk dalam kategori sangat tinggi. rata-rata tingkat efektifitas PAD dikatakan kurang efektif. Hasil analisis untuk kinerja belanja daerah dari sisi varians belanja dan keserasian belanja baik dan serasi atau seimbang dalam mengalokasikan belanja daerah karena alokasi belanja operasional lebih besar daripada belanja modal. Sedangkan tingkat rata-rata Efisiensi belanja daerah secara keseluruhan Kota Makassar selama tahun 2018-2021 termasuk dalam kategori efisien karena memiliki nilai dibawah 100% yaitu 82%.

**Kata Kunci:** Kinerja APBD, Kinerja Pendapatan Daerah dan Kinerja Belanja Daerah.

*This study aims to determine the performance of the Makassar City regional revenue and expenditure budget (APBD) from 2018 to 2021. The method used is quantitative descriptive analysis for calculating revenue performance analysis and regional government spending performance analysis. The results of this study showed that the variance of regional income was not good, the average degree of decentralization analysis was categorized as sufficient, the average regional financial independence was categorized as very good. The average financial dependence is included in the very high category. The average level of effectiveness of PAD is said to be less effective. The results of the analysis for the performance of regional spending in terms of spending variance and spending harmony are good and harmonious or balanced in allocating regional spending because the allocation for operational spending is greater than capital spending. Meanwhile, the average level of regional spending efficiency as a whole for Makassar City during 2018-2021 is included in the efficient category because it has a value below 100%, namely 82%.*

**Keywords:** APBD Performance, Regional Revenue Performance and Regional Expenditure Performance.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	11
1.4.3 Kegunaan Kebijakan .....	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	13
2.1.1 Kinerja .....	13
2.1.2 Akuntabilitas Kinerja .....	14
2.1.3 Indikator Kinerja .....	14
2.1.4 Syarat-syarat yang harus dipatuhi indikator kinerja .....	15
2.1.5 Pengukuran Kinerja .....	15
2.1.6 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja ...	16

2.2 Pengertian Anggaran <b>DAFTAR ISI</b> .....	18
2.2.1 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik.....	19
2.2.2 Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik .....	20
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ..	21
2.3.1 Pihak yang Terlibat dalam Anggaran Pemerintah Daerah.....	22
2.3.2 Prinsip Penyusunan APBD .....	23
2.3.3 Penyusunan Kebijakan Umum APBD .....	24
2.4 Analisis Kinerja Anggaran .....	25
2.5 Tinjauan Empirik .....	28
2.6 Kerangka Pemikiran .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	31
3.2 Tempat dan Waktu.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
4.2 Visi dan Misi BPKAD Kota Makassar.....	38
4.3 Strategi dan Kebijakan BPKAD .....	38
4.4 Struktur Organisasi BPKAD.....	40
4.5 Uraian Tugas dan Fungsi .....	40
4.5.1 Kepala Badan.....	40
4.5.2 Bidang Anggaran .....	44
4.6 Hasil dan Pembahasan.....	51
4.6.1 Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2018-2021 .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63

5.2 Saran.....	64
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Kriteria Varians Pendapatan .....	32
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi .....	33
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Tingkat Kemandirian keuangan Daerah .....	33
Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah .....	33
Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Tingkat Efektifitas PAD .....	34
Tabel 3.6 Kriteria Varians Belanja .....	35
Tabel 3.7 Kriteria Penilaian Keserasian Belanja .....	36
Tabel 3.8 Kriteria Penilaian Pertumbuhan Belanja .....	36
Tabel 4.1 Perhitungan Varians Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-2021 .....	52
Tabel 4.2 Perhitungan Derajat Desentralisasi Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-2021 .....	53
Tabel 4.3 Perhitungan Tingkat Kemandirian Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-2021 .....	54
Tabel 4.4 Perhitungan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-2021 .....	55
Tabel 4.5 Perhitungan Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-2021 .....	57
Tabel 4.6 Perhitungan Varians Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-2021 .....	58
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasional) Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-2021 ....	59
Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal) Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-2021 ....	60
Tabel 4.9 Perhitungan Efisiensi Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018-2021 .....	61

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Biodata .....	70
Lampiran 2. Peta Teori.....	71
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian .....	73
Lampiran 4. Surat Telah Melakukan Penelitian .....	74
Lampiran 5. Struktur Organisasi .....	75
Lampiran 6. Laporan Keuangan.....	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Setiap tahun juga selalu saja pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai oleh pemerintah, serta sebagai alat untuk pengendalian alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislatif untuk nanti dibelanjakan.

Menurut Mahsun (2013:25) "Kinerja (*performance*) merupakan gambaran perihal tingkat penerimaan pelaksanaan suatu tindakan dalam menciptakan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tercantum dalam rencana strategi

suatu organisasi". Pentingnya Kinerja Anggaran sebagai perencanaan dan pengendalian dalam instansi untuk merealisasikan penganggaran sebagai sektor penting bagi kesuksesan organisasi.

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan unit moneter. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen bagi kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Analisis kinerja anggaran adalah capaian kinerja penggunaan anggaran Kementrian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Instansi pemerintah memiliki berbagai anggaran diantaranya adalah anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan adalah suatu perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan pemerintah sebagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja negara. Sedangkan anggaran belanja adalah suatu perkiraan mengenai batas

pengeluaran tertinggi keuangan pemerintah bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah untuk satu tahun.

Perusahaan maupun instansi pemerintah dalam menyusun anggaran perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi syarat perusahaan dalam menyusun anggaran yaitu adanya organisasi perusahaan yang sehat yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, adanya sistem akuntansi yang memadai, adanya penelitian analisis yang diperlukan untuk menetapkan alat ukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun tingkat bawah.

Dalam pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan hanya kemampuan dalam menunjukkan bagaimana dana publik yang dibelanjakan, namun mencakup kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut sudah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien merupakan penggunaan dana masyarakat yang menghasilkan output yang maksimal, efektif merupakan pemakaian anggaran yang wajib mencapai target serta tujuan untuk kepentingan publik, serta ekonomis yang saling berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam jumlah tertentu.

Setiap kemungkinan penyimpangan dari target anggaran mengakibatkan kesenjangan Anggaran. Adanya perbedaan antara target pendapatan potensial dan target anggaran menunjukkan terjadinya tingkah laku individu untuk mengurangi target pendapatan sehingga menjadi lebih mudah dan aman untuk intensi anggaran (mengamati anggaran) untuk dipertimbangkan. Belanja pada laporan Kinerja Anggaran merupakan faktor penting dalam menarik perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik

melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah juga mencerminkan kebijakan yang menghasilkan pendapatan yang lebih sulit dari pada belanja karena sifat belanja yang relatif sederhana dan kerentanannya terhadap inefisiensi dan kelalaian. Maka perencanaan, dan pengendalian terhadap belanja sangatlah penting untuk dilakukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBD ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dimana APBD ini meliputi masa satu tahun, dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. APBD terdiri dari anggaran pendapatan (penerimaan) dan anggaran belanja (pengeluaran). Anggaran Pendapatan menggambarkan rencana-rencana penerimaan yang akan diperoleh suatu daerah sedangkan anggaran belanja merupakan gambaran dari rencana pengeluaran suatu daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membutuhkan pengelolaan yang tepat. Untuk melihat seberapa efektif dan efisien suatu pengelolaan keuangan maka dibutuhkan pengukuran kinerja dari APBD tersebut. Menurut Mahmudi (2010) Pengukuran kinerja merupakan proses evaluasi terhadap perolehan dari maksud beserta target yang telah ditetapkan, seperti informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya di dalam menghasilkan goods & services, kualitas goods & services, perbandingan hasil kerja dengan sasaran serta juga efektivitas tindakan di dalam mencapai sasaran.

Penelitian ini mereplikasi penelitian oleh Sutrisna S (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objeknya. Objek yang diteliti oleh Sutrisna S (2016) yaitu pada Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, maka pada penelitian ini memilih pada Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Makassar.

Peran APBD sebagai pembangunan daerah yaitu untuk pedoman dalam perencanaan besaran penerimaan dan pengeluaran berbagai sektor yang difokuskan pada upaya pelaksanaan program dan kegiatan, seperti kesempatan atau akses yang lebih besar terhadap aset produksi, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, prasarana, dan fasilitas lainnya yang menunjang aktivitas daerah. Semua program tersebut memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan dan pengembangan daerah melalui kebijakan keuangan daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia akan berdampak pada perekonomian daerah. Adanya kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, serta atas tanggung jawab dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut memiliki kemungkinan besar daerah dapat merumuskan pelaksanaan dan perancangan pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik dan tepat sasaran dapat berdampak baik bagi daerah dan menyejahterakan masyarakat. Sehingga antara pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat saling berhubungan.

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja Perangkat Daerah. Penilaian kinerja dilakukan agar mengetahui peningkatan atau perkembangan entitas yang terjadi dari tahun ke tahun, serta juga mengevaluasi kinerja penggunaan sumber daya daerah, terutama pada saat-saat masa darurat seperti pandemic saat itu.

Dalam APBD Kota Makassar masih banyak program yang tidak berjalan sehingga serapan anggaran rendah dan membuat potensi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sangat besar. Problem ini begitu banyak program yang dibuat SKPD bahwa tidak memiliki perencanaan yang baik, padahal ada banyak program fisik seperti pembangunan gedung yang tidak berjalan. Beberapa di antaranya adalah pembangunan rumah sakit dan gedung sekolah.

Hal ini kemudian dianggap sebagai preseden buruk bagi DPRD Makassar karena banyak anggaran yang terkesan sia-sia. Sebab, jika program tersebut dipaksakan untuk dijalankan di APBD maka kecil kemungkinan bisa selesai tepat waktu. Misalnya pembuatan gedung-gedung, di Pariwisata misalnya perahu pinisi, di rumah sakit, di dinas pendidikan ada sekolah. Yang sifatnya konstruksi, jika hal tersebut dilanjutkan maka bisa jadi sia-sia.

Program fisik yang tidak berjalan dengan baik sudah semestinya dirasionalisasi. Sebab, waktu tiga bulan untuk menjalankan program fisik di APBD dinilai sangat singkat. Di Kota Makassar sering kali terjadi sebuah masalah yang disebabkan karena pemberian anggaran namun tidak

pernah terlaksanakan dengan baik yang dimana masalah tersebut berdampak kepada masyarakat yang kecewa. Sejak dua tahun COVID tidak jalan, banyak program yang menyentuh masyarakat seperti jalan, jembatan, drainase, itu tidak terlaksana. pembahasan APBD sudah mulai masuk ke komisi-komisi. Agenda pembahasannyapun disebut sedikit molor lantaran kondisi serapan anggaran yang masih rendah. (<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6158151/kemenkeu-hingga-kemendagri-soroti-rendahnya-serapan-apbd-makassar>).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar mengalami defisit hingga Rp947 miliar pada tahun 2020, Setelah dikalkulasi estimasi defisit mencapai Rp947 miliar. Mau tak mau terjadi defisit karena pandemi Covid-1. Defisit anggaran tersebut lantaran berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dana dari pemerintah pusat sedangkan untuk anggaran belanjanya pemerintah pusat menginstruksikan untuk membatasi penggunaan anggaran, khususnya belanja langsung. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan rasionalisasi anggaran sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Lalu, melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19. Alhasil, PAD Makassar dipastikan tak mampu mencapai target sekitar Rp1,7 triliun pada tahun 2020. ( <https://upeks.co.id/2020/05/akibat-covid-19-makassar-defisit-rp947-m/> )

Anggaran dan Realisasi menunjukkan seberapa efektif atau buruk suatu instansi dalam membuat keputusan penganggaran dan pendanaan untuk mengelola kegiatan lembaga untuk tahun anggaran. Dengan menggunakan alat ukur berupa analisis yang ada berdasarkan uraian untuk mendukung analisis Kinerja Anggaran Belanja. Untuk melihat secara besarnya varians anggaran belanja dan realisasinya yang dapat ditunjukkan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dapat dilihat sejauh mana keefektifan dalam penerapan anggaran untuk aktifitas instansi selama satu tahun anggaran.

Pengukuran Kinerja Anggaran ini memungkinkan untuk memeriksa jumlah anggaran yang direalisasikan dalam instansi dengan menggunakan analisis varians belanja untuk melihat seberapa baik kemajuannya dalam memenuhi pengeluaran aktivitas yang dibelanjakan oleh instansi.

Pengukuran Kinerja Anggaran lainnya bisa dilakukan dengan menggunakan analisis keserasian belanja yang berguna untuk melihat proporsi antar belanja. Misalnya dengan menilai rasio belanja modal terhadap total belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui proporsi antar belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal.

Dalam mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berupa angka efisiensi yang tidak bersifat absolut tetapi relatif. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja yang berguna untuk memperlihatkan produktifitas belanja modal.

Penelitian yang dilakukan May dkk. (2022) melakukan analisis kinerja Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan



Daerah Kota Manado, dimana penelitian ini memperoleh hasil bahwa penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran itu sudah efisien karena tidak melebihi target anggaran pada periode tersebut. Sedangkan dari hasil pengukuran Rasionya masih kurang efisien karena belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Wiranda (2021) melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian yang dilakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Dilihat dari varians belanjanya kinerja keuangan sudah dapat dikatakan baik. Sedangkan kinerja anggaran belanjanya dilihat dari rasio pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan Wahyuniar (2017) melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dengan hasil kinerja anggaran pendapatannya secara keseluruhan dapat dikatakan baik begitu juga dengan kinerja keuangan belanja daerahnya.

Sinambela, Pohan (2016) melakukan penelitian terhadap kinerja anggaran belanja dengan menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian bahwa kinerja pendapatan dapat dikatakan baik begitupun dengan kinerja belanjanya. Begitu pula dengan penelitian Tantri, Irmawati (2018) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini kinerja anggaran belanjanya menunjukkan kinerja yang baik. Penelitian dari Syamsuddin dkk. (2022) Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan hasil bervariasi yang tiap tahunnya berbeda namun masih dikatakan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis kinerja anggaran belanja pada APBD. Oleh karena itu peneliti mengambil judul "**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2021**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan menyajikan bagaimana kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun 2018-2021.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar selama periode 2018-2021.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Menurut Nazir (1988) kegunaan penelitian yaitu untuk menguji efek dari keadaan tertentu. Masalah ini dapat dikelola dengan eksperimen atau berdasarkan pengamatan yang tidak terkontrol.

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan sebagai bahan bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian tambahan tentang efektivitas anggaran daerah dan melengkapi bahan pustaka yang ada.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini selain sebagai pembelajaran bagi masyarakat, temuan studi ini juga diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa yang berniat untuk melakukan studi serupa.

#### **1.4.3 Kegunaan Kebijakan**

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan contoh bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, memilih jalur yang akan diambil, dan menyusun rencana aksi untuk meningkatkan efektivitas anggaran daerah di Kota Makassar.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini terbatas hanya pada ruang lingkup kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Makassar pada tahun 2018-2021.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pertama dari skripsi, dimana pada bab ini pembaca akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang apa dan mengapa penelitian itu dilakukan dan untuk siapa penelitian ditujukan. Maka pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan. Disini peneliti wajib menyajikan teori-teori dari hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti selain

itu peneliti juga dapat memasukkan tinjauan empirik yang menjadi dasar atau acuan dalam penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mencakup rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan mengenai hasil-hasil yang diperoleh dari pengujian dan penelitian yang dilakukan. Jika memungkinkan dapat ditambahkan pembahasan atau temuan penelitian.

### BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir skripsi ini memuat tiga hal pokok, yaitu kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Menurut pendapat Cooper (dalam Umar, 2004:50) teori adalah sekelompok ide, penjelasan, klaim, dan variabel yang dihubungkan satu sama lain dan digeneralisasikan secara sistematis untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (fakta) tertentu.

Menurut Tan (dalam Koentjaraningrat, 1997:32) mengatakan bahwa konsep adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas. Biasanya menjadi elemen utama dalam penelitian faktual.

##### 2.1.1 Kinerja

Menurut Mahsun (2013:25) "Kinerja (*performance*) merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tercantum pada rencana strategi suatu organisasi". Kinerja hanya dapat diketahui jika seseorang maupun sekelompok orang memiliki standar keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria kinerja ini diberikan dalam bentuk tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Tanpa tujuan serta target, tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana kinerja individu atau organisasi karena tidak ada tolak ukurnya.

Pengukuran kinerja disisi lain adalah proses mengevaluasi kemajuan pekerjaan menuju tujuan dan sasaran tertentu, termasuk efisien penggunaan sumber daya dalam produksi barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa

(seberapa barang dan jasa disampaikan kepada pelanggan dan seberapa puas pelanggan), hasil kegiatan dibandingkan dengan tujuan.

### **2.1.2 Akuntabilitas kinerja**

Menurut Mahsun (2012:169) Akuntabilitas berhubungan pada mekanisme pengawasan, pelaporan dan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, pengelola publik mampu bertransformasi dari peran ketaatan pasif menjadi partisipan aktif dalam menetapkan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik.

### **2.1.3 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/ program/ kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja pelaksanaannya.

Instansi pemerintah belum disebut berkinerja sebelum dapat menunjukkan keberhasilan pencapaian outcome-nya. Namun demikian, outcome mungkin baru bisa dicapai setelah beberapa tahun kemudian. Sehingga instansi pemerintah mungkin baru benar-benar bisa menunjukkan keberhasilan kinerjanya setelah beberapa tahun kemudian. Untuk hal seperti ini, instansi pemerintah harus mampu menunjukkan hubungan antara output-output dan aktivitas yang telah dikerjakan setiap tahunnya dengan kinerja yang baru akan diperoleh di masa yang akan datang.

#### **2.1.4 Syarat-Syarat yang harus dipatuhi Indikator Kinerja**

Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagaiberikut:

1. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (*accomplishment*);
3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

#### **2.1.5 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Menurut Hansen dan Mowen (2004), pengukuran kinerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.

Sistem pengukuran kinerja hanyalah suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan bahwa organisasi tersebut akan mengimplementasikan strateginya dengan baik. Menurut Yuwono (2002), pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.

Sedangkan menurut Mahmudi (2010), pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

#### **2.1.6 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja**

Menurut Mahmudi (2005), tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.** Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan



dan menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

2. **Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.** Penilaian kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, ketrampilan atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.
3. **Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.** Penerapan penilaian kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi dengan menciptakan keadaan dimana setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi.
4. **Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan dan hukuman.** Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem penghargaan seperti kenaikan gaji/tunjangan, promosi atau hukuman seperti penundaan promosi atau teguran, yang memiliki hubungan yang jelas dengan pengetahuan, ketrampilan dan kontribusi terhadap kinerja organisasi.
5. **Memotivasi pegawai.** Dengan adanya penilaian kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi atau baik akan memperoleh penghargaan.
6. **Menciptakan akuntabilitas publik.** Penilaian kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan berguna bagi pihak internal maupun eksternal organisasi.

Menurut Yuwono dkk (2007), manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste).
4. Membuat suatu sasaran strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
5. Membangun konsensus untuk melakukan sesuatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan tersebut. Uraian manfaat pengukuran kinerja tersebut sudah cukup baik, hanya saja kekurangannya belum mengungkapkan manfaat pengukuran kinerja terkait dengan aspek non-market yaitu lingkungan dan sosial.

## **2.2 Pengertian Anggaran**

Anggaran berasal dari kata budget (inggris), sebelumnya dari kata bougette (perancis) yang berarti “sebuah tas kecil”. Anggaran dalam arti luas mencakup periode dimana anggaran direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit merupakan rencana pendapatan serta pengeluaran dalam satu tahun. Penganggaran (budgeting) adalah aktifitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk

mendanai biaya organisasi yang seringkali tidak terbatas. (Haryanto dkk.2007:67 – 68).

Menurut Nafari (2000) Anggaran ialah rencana tentang sebuah organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Anggaran biasanya dinyatakan dalam satuan mata uang, namun dapat juga dikatakan dalam satuan barang dan jasa.

Menurut Supriyono (1990) Anggaran adalah perencanaan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengawasan keuangan perusahaan dimasa yang akan datang. Anggaran ialah rencana jangka pendek yang disusun secara sistematis berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, menurut Simamora (1999) Anggaran adalah rencana rinci tentang bagaimana sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan dalam periode waktu tertentu.

### **2.2.1 Jenis - Jenis Anggaran Sektor Publik**

Mardiasmo (2009) menyebutkan anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yakni anggaran operasional dan anggaran modal.

#### **1. Anggaran Operasional**

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat digolongkan sebagai anggaran operasional yaitu pengeluaran rutin. Pengeluaran berulang merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya berlangsung selama satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan pemerintah.

#### **2. Anggaran Modal**

Anggaran modal menunjukkan perencanaan serta pengeluaran jangka panjang untuk aktifa tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot

serta sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal atau biasa disebut dengan belanja investasi ialah luaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran serta akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, kemudian selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

### **2.2.2 Prinsip - Prinsip Anggaran Sektor Publik**

Dalam pelaksanaan anggaran sektor publik ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip – prinsip dalam anggaran sektor publik menurut Haryanto dkk (2007) Terdiri dari 8 yaitu:

1. Otorisasi Oleh Legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan persetujuan dari legislatif terlebih dulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan serta pengeluaran pemerintah.

3. Keutuhan Anggaran

Semua penerimaan serta belanja pemerintah harus terangkum dalam dana umum.

4. *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

5. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, yang bersifat multitahunan.

#### 6. Akurat

Estimasi anggaran tidak boleh memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat digunakan sebagai kantong pemborosan atau inefisiensi anggaran yang mengarah pada perkiraan pendapatan yang sangat rendah serta perkiraan biaya yang sangat tinggi.

#### 7. Jelas

Anggaran harus sederhana dan mudah dipahami masyarakat serta tidak membingungkan.

#### 8. Diketahui Publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat umum.

### **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Pada Permedagri Nomor 27 Tahun 2021 “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Badrudin (2017:98) “ Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran rencana kerja pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

Menurut Halim, Kusufi (2014:21) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Pasal 64 ayat 2, sebagai landasan penegasannya. “APBD dapat dicirikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang di satu sisi menggambarkan perkiraan pengeluaran, yang diperkirakan setinggi mungkin untuk membiayai

kegiatan dan proyek daerah dalam tahun anggaran tertentu, dan di sisi lain menggambarkan perkiraan pendapatan dan sumber pendapatan daerah untuk menutupi pengeluaran tersebut.

### **2.3.1 Pihak yang Terlibat dalam Anggaran Pemerintah Daerah**

Adapun menurut Sujarweni (2015:60) “pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

#### **1. Pihak Eksekutif**

Pihak Eksekutif Pihak-pihak yang terlibat dalam pihak eksekutif yaitu terdiri dari:

- a. Bupati/Walikota memutuskan kegiatan dan pelayanan publik
- b. Sekretaris Daerah (Sekda) Sebagai koordinator Tim Anggaran administrasi yang melaporkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada DPRD. Kebijakan umum anggaran adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
- c. Tim Anggaran Eksekutif adalah Sekretaris Daerah yang bertugas dalam menyusun pedoman umum anggaran serta menyusun rencana kerja anggaran setiap masing-masing satuan kerja yang dituju (RKA-SKPD) menjadi RAPBD.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu unit kerja pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas menyusun dan mengelola anggaran pada unit kerja yang bersangkutan.
- e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDA) BAPEDA adalah badan perencanaan daerah yang mempunyai tugas untuk menyiapkan berbagai dokumen perencanaan dan pembangunan di daerah.

- f. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) bertanggungjawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah serta berfungsi sebagai bendahara umum daerah.

## 2. Pihak Legislatif

Pihak Legislatif yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah meliputi:

- a. Panitia Anggaran Legislatif sebuah tim khusus yang bertugas memberikan saran kepada kepala daerah (bupati/walikota) mengenai keputusan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam rapat Paripurna.
- b. Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memudahkan tanggungjawab DPRD di bidang pemerintah, perekonomian dan pembangunan, keuangan, investasi daerah, dan kesejahteraan rakyat.

### 2.3.2 Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. dijalankan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

### **2.3.3 Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Setiap tahun, kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk RKPD dan APBD. Kebijakan Umum APBD, juga dikenal sebagai KUA yang merupakan dokumen dalam menguraikan asumsi dan kebijakan yang mendasari untuk pendanaan, pengeluaran, dan pendapatan tahun yang bersangkutan. Tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang harus diperjelas dalam proses perencanaan kebijakan anggaran, yang juga akan menginformasikan proses pertanggungjawaban (LPJ) atas kinerja keuangan daerah pada akhir tahun. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan operasional anggaran karena merupakan prosedur teknis.

Sebagai pedoman anggaran operasional, pembuatan Kebijakan Umum APBD berada di bawah judul perumusan kebijakan anggaran. Perencanaan operasional anggaran berkonsentrasi pada distribusi sumber daya yang tersedia untuk pemerintah daerah, sedangkan pengembangan kebijakan anggaran difokuskan pada analisis fiskal.

Menurut pendekatan kinerja, APBD ditentukan berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai sepanjang tahun anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD akan membuat KUA sebagai bagian dari proses pembuatan rancangan APBD, yang akan memuat pedoman umum bagi unsur-



unsur yang telah disepakati. Pedoman anggaran KUA berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Penyusunan KUA merupakan bagian bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah (Renstra). Sementara itu, tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan untuk satu tahun anggaran, pada dasarnya sesuai dengan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Prosedur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 34 digunakan untuk merumuskan kebijakan umum anggaran daerah:

- a. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD
- b. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun
- c. Kemudian Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya tersebut sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun anggaran berjalan.

## **2.4 Analisis Kinerja Anggaran**

Sistem pengukuran kinerja memungkinkan organisasi untuk menciptakan penghargaan dan hukuman, sistem ini dapat digunakan sebagai alat kontrol. Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah untuk meningkatkan komunikasi strategi, menyeimbangkan indikator kinerja keuangan dan non-keuangan, memahami kepentingan manajer tingkat menengah dan bawah, dan mendorong

penyelarasan tujuan, strategi untuk mencapai kepuasan individu dan kelompok yang rasional.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain memberikan pemahaman kepada manajer tentang ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen, mengarahkan mereka untuk memenuhi target kinerja yang telah ditentukan, memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta membandingkannya dengan target kinerja, kemudian mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja, yang berfungsi sebagai dasar untuk secara rutin memberikan penghargaan dan menegakkan hukuman. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan untuk meningkatkan kinerja organisasi, tujuan pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang disepakati membantu dalam menentukan apakah kepuasan pelanggan telah tercapai, memperjelas cara kerja operasi instansi pemerintah, dan memastikan bahwa keputusan dibuat secara objektif.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas mengenai pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam waktu satu tahun dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Analisis kinerja anggaran adalah capaian kinerja penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia dalam suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator kinerja. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk mengevaluasi kinerja di masa lalu melalui berbagai analisis untuk diperoleh posisi keuangan yang mewakili realisasi entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan

berkelanjutan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan dalam melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan akurat, dengan menyusun suatu laporan keuangan yang telah memenuhi ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya layanan yang biasa dikenakan untuk penggunaan layanan publik. Masyarakat tentu tidak ingin terus membayar kecuali kualitas dan kuantitas yang mereka terima tidak terjadi peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Secara teori tidak ada keseragaman istilah dan aturan pengukuran karena analisis rasio belum banyak diterapkan di sektor publik, khususnya APBD. Analisis rasio terhadap APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan data dari satu periode ke periode sebelumnya. Sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan laporan realisasi anggaran, khususnya analisis varians pendapatan daerah, analisis rasio keuangan daerah yang meliputi derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio ketergantungan daerah, rasio efektifitas PAD, analisis varians belanja daerah dan analisis keserasian belanja daerah yaitu meliputi analisis belanja operasi dan belanja modal serta analisis efisiensi belanja daerah. Secara keseluruhan dapat ditunjukkan dengan melihat kinerja belanja. Dapat dikatakan bahwa APBD berjalan dengan baik jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka yang diinginkan.

## 2.5 Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu atau tinjauan empirik menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya juga merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung bagi peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini Gordon Angel May, Jessy D. L. Warongan, Natalia Y. T. Gerungai (2022), Dara Gendis Wiranda (2021), Wahyuniar (2017), Elizar Sinambela, Kiki Rizki Ana Pohan (2016), Sakina Nusarifa Tantri dan Putri Irmawati (2018), Indah Syamsuddin, Putri Nurjannah Muhammad, Abdul Karim (2022).

Penelitian May dkk, (2022) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis varians Anggaran Belanja ditemukan hasil bahwa penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran itu sudah efisien karena tidak melebihi target anggaran pada periode tersebut. Sedangkan dari hasil pengukuran Rasionalitas masih kurang efisien karena belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Penelitian Wiranda (2021) melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan metode penelitian yang dilakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Dilihat dari varians belanjanya kinerja keuangan sudah dapat dikatakan baik. Sedangkan kinerja anggaran belanjanya dilihat dari rasio pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang negatif.

Wahyuniar (2017) melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dengan

hasil kinerja anggaran pendapatannya secara keseluruhan dapat dikatakan baik egitu juga dengan kinerja keuangna belanja daerahnya.

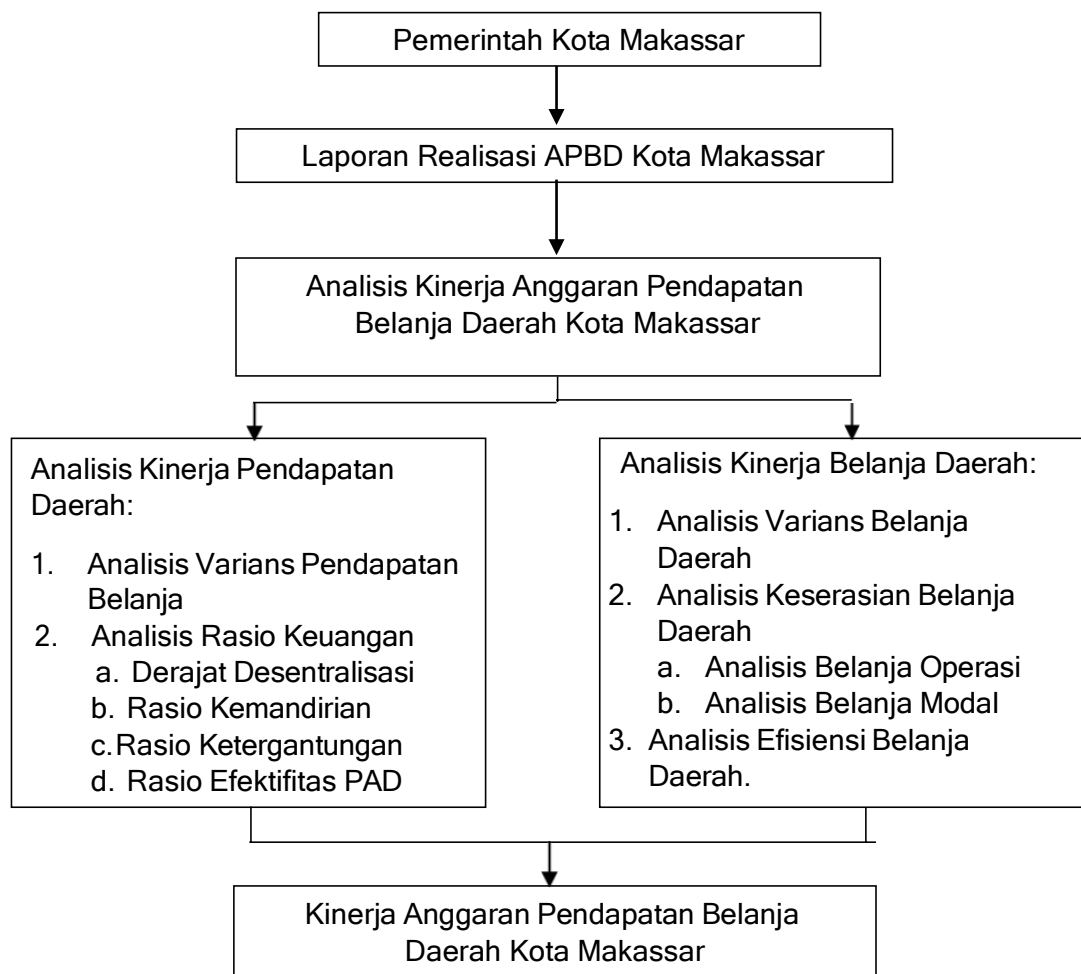
Sinambela, Pohan (2016) melakukan penelitian terhadap kinerja anggaran belanja dengan menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian bahwa kinerja pendapatan dapat dikatakan baik begitupun dengan kinerja belanjanya.

Tantri, Irmawati (2018) mengguankan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini kinerja anggaran belanjanya menunjukkan kinerja yang baik.

Syamsuddin dkk (2022) Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan hasil bervariasi yang tiap tahunnya berbeda namun masih dikatakan baik.

## **2.6 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran belanja pada APBD di Kota Makassar. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1.** Kerangka Pemikiran Penelitian.